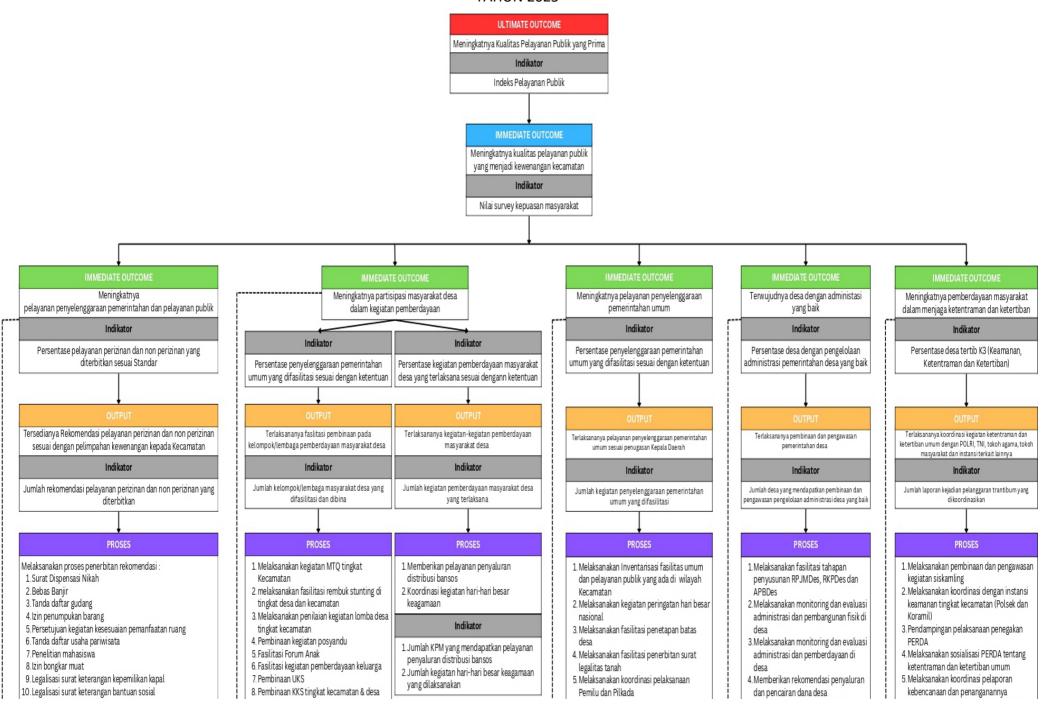
POHON KINERJA KECAMATAN SUNGAI LOBAN

TAHUN 2025



- 11. Legalisasi surat keterangan ahli waris
- 12. Legalisasi surat keterangan kematian
- 13. Legalisasi surat keterangan silsilah keluarga
- 14. Legalisasi surat keterangan pensiun
- 15. Legalisasi surat keterangan tidak mampu
- 16. Legalisasi Proposal
- 17. Legalisasi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
- 18. Legalisasi surat keterangan pengajuan pendaftaran TNI / POLRI

Indikator

Jumlah rekomendasi yang diterbitkan :

- 1. Surat Dispensasi Nikah
- 2. Bebas Banjir
- 3. Tanda daftar gudang
- 4. Izin penumpukan barang
- 5. Persetujuan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang
- 6. Tanda daftar usaha pariwisata
- 7. Penelitian mahasiswa
- 8. Izin bongkar muat
- 9. Legalisasi surat keterangan kepemilikan kapal
- 10. Legalisasi surat keterangan bantuan sosial
- 11. Legalisasi surat keterangan ahli waris
- 12. Legalisasi surat keterangan kematian
- 13. Legalisasi surat keterangan silsilah keluarga
- 14. Legalisasi surat keterangan pensiun
- 15. Legalisasi surat keterangan tidak mampu
- 16. Legalisasi Proposal
- 17. Legalisasi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
- 18. Legalisasi surat keterangan pengajuan pendaftaran TNI / POLRI

Crosscutting:

- 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2. Dinas Penanaman Modal & PTSP
- 3. Badan Pendapatan Daerah
- 4. Dinas Kesehatan
- 5. Dinas Sosial
- 6. KUA

Indikator

- Jumlah peserta MTQ tingkat Kecamatan yang mengikuti sesuai cabang lomba
- Jumlah rembuk stunting di tingkat desa dan kecamatan yang difasilitasi
- Jumlah desa yang memenuhi standar penilaian untuk di ikutsertakan pada lomba desa tingkat kabupaten
- 4. Jumlah posyandu yang dibina
- 5. Jumlah kegiatan Forum Anak yang difasilitasi
- 6. Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang difasilitasi
- 7. Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan UKS
- Jumlah pembinaan KKS tingkat kecamatan & desa yang difasilitasi

Crosscutting:

- 1. Dinas PMD
- 2. Dinas Sosial
- 3. Dinas P3AP2KB
- 4. Dinas Kesehatan
- 5. Dinas Pendidikan
- 6. DisKumdagri
- 7. Disnakertrans
- 8. Disbudporpar
- 9 Bagian Kesra
- 10. Bagian Perekonomian, SDA dan Adm Pembangunan
- 11. Kemenag

Indikator

- Jumlah fasilitas umum dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan yang diinventarisir
- Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan
- Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan batas desa
- Jumlah penerbitan surat legalitas tanah yang difasilitasi
- 5. Jumlah koordinasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan

Crosscutting:

- 1. Dinas PUPR
- 2. Dinas Perkimtan
- 3. Dinas Perhubungan
- 4. Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian
- 5. Badan Kesbangpol
- 6. Dinas Lingkungan Hidup
- 7. Bagian Pemerintahan
- 8.KPU

- Melaksanakan fasilitasi kegiatan musrenbang desa
- Melaksanakan kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan
- 7. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemilihan Kepala Desa dan BPD
- 8. Memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Indikator

- Jumlah dokumenRPJMDes, RKPDes dan APBDes yang difasilitasi dalam tahapan penyusunannya
- 2. Jumlah pembangunan fisik di desa yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi
- Jumlah kegiatan pemberdayaan di desa yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi
- Jumlah rekomendasi penyaluran dan pencairan dana desa yang diterbitkan
- Jumlah kegiatan musrenbang desa vang difasilitasi
- Jumlah usulan desa pada Musrenbang tingkat Kecamatan yang diakomodir
- 7. Jumlah kegiatan pemilihan Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi
- 8. Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan

Crosscutting:

- 1. Inspektorat Daerah
- 2.Bappedalitbang
- 3.BPKAD
- 4. Dinas PMD

 Melaksanakan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama terkait kewaspadaan dini masyarakat

Indikator

- Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan siskamling yang terlaksana
- 2. Jumlah koordinasi dengan instansi keamanan tingkat kecamatan
- 3. Jumlah kegiatan penegakan PERDA yang didampingi
- Jumlah kegiatan sosialisasi PERDA tentang ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana
- Jumlah laporan bencana yang dikoordinasikan
- 6. Jumlah koordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama terkait kewaspadaan dini masyarakat



- 1. Dinas Satpol PP Damkar
- 2. Badan Kesbangpol
- 3. BPBD
- 4. Bagian Hukum

